

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mencapai tujuan nasional melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memajukan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial dan perdamaian abadi, Indonesia saat ini sedang gencar melakukan pembangunan di segala bidang. Sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945(Tirtawati, 2018).

Tidak hanya pembangunan fisik bangsa yang dibahas di sini, namun juga pembangunan mental bangsa. Tanpa perbaikan sistem pemerintahan, pembangunan ini tidak mungkin berjalan lancar. Karena pembangunan dapat dilakukan dengan baik dengan sistem pemerintahan yang baik dan teratur.(Irmansyah et al., 2021).

Rahasia mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat suatu daerah adalah dengan mengintegrasikan pembangunan daerah dengan pertumbuhan nasional. Perencanaan pembangunan yang matang, kompeten, menyeluruh, dan berkesinambungan diperlukan untuk mencapai hal tersebut. Otonomi daerah yang lebih kuat berarti agar daerah dapat bersaing dalam pasar yang lebih ketat, maka daerah harus lebih otonom dalam menyusun rencana pembangunannya(Rahmad, 2022).

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari provinsi-provinsi yang masing-masing provinsi terdiri dari wilayah-wilayah yang lebih kecil seperti desa, kelurahan, dan kabupaten. Provinsi-provinsi ini bersatu

menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, kemajuan perlu didistribusikan secara adil ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pembangunan dalam konteks ini dapat dipahami sebagai upaya kerja sama untuk secara sah memberikan pilihan tambahan kepada setiap individu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.(Dody Eko Wijayanto, SH, 2014)

Salah satu landasan utama pembangunan nasional adalah pembangunan infrastruktur pedesaan. Desa merupakan komponen penting bangsa dan memainkan peran penting dalam pertumbuhannya. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, yang merupakan tulang punggung sosial dan ekonomi negara.(I Wayan Sutrisna, 2023).

Pembangunan infrastruktur desa berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Pembangunan prasarana dan sarana fisik seperti jalan, jembatan, sistem irigasi, listrik, telekomunikasi, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan disebut dengan pembangunan infrastruktur desa.

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, memajukan masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa, sesuai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kepala desa secara tegas diwajibkan oleh undang-undang ini untuk mengawasi pembangunan desa, dengan menggunakan semua alat yang dimilikinya, termasuk keterlibatan

masyarakat(UUD RI NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, 2014).

Sarana dan prasarana, serta peningkatan pendidikan dan kesehatan, sangat penting untuk meningkatkan pembangunan desa. Pembangunan di daerah pedesaan biasanya menghadapi tantangan karena masyarakat pedesaan tidak memiliki akses yang cukup untuk mengambil keputusan tentang kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan. akibatnya, terdapat pembatasan terhadap kemampuan pemerintah untuk berkoordinasi dengan masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan. Untuk meningkatkan pembangunan desa, orang harus berpartisipasi dan bekerja sama dengan masyarakat untuk menjaga dan mengawasi kemajuan, bagaimana pemerintahan desa akan bertindak. Pemerintah desa harus mengawasi pembangunan di desa. Untuk memastikan bahwa pembangunan terus berjalan, apabila terjadi kesalahan atau kesalahan yang dapat diperbaiki maka pengawasan harus dilakukan dengan baik.

Persyaratan kualitas pembangunan desa meliputi input, proses, output, tenaga kerja pemerintah, saran, infrastruktur, dan biaya yang selaras dengan tujuan program pemerintah desa yang direncanakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat saat ini. Pembangunan desa tenaga kerja pemerintah harus bertanggung jawab dan disiplin dalam semua tugas yang diberikan. Pegawai pemerintah memainkan peranan penting dalam pembangunan desa dan dapat melakukan tugasnya secara profesional untuk mendorong pembangunan yang lebih besar. Mereka penting untuk menciptakan kualitas tinggi(Sigalingging & Warjio, 2014).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk sebagai lembaga legislatif dan wadah pengelolaan dan pengaturan kepentingan daerah. Tanggung jawabnya antara lain mengatur pemerintahan desa, membuat peraturan daerah, dan membimbing serta mengakomodasi tujuan masyarakat. Organisasi ini pada hakikatnya mendukung pemerintahan desa dengan bekerja sama dalam isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan, urusan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat (Emilda, 2011)

Diperlukan suatu motivator atau komponen yang dapat mengubah dan mengarahkan kemampuan masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan agar dapat menggugah partisipasi dalam pembangunan. Sebagai pemimpin tertinggi, kepala desa mempunyai peranan yang sangat penting. Sebagai pemimpin tertinggi yang bertugas mengatur dan membangun bangsa, ia harus mampu mengembangkan peran yang telah dipercayakan kepadanya (Hakim et al., 2018).

Pembangunan infrastruktur di desa Wonoagung, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang masih banyak jalan-jalan penghubung dari dusun ke dusun yang masih belum layak pakai bagi pengguna jalan. Banyak pengguna jalan yang seringkali jatuh pada saat pergi ke suatu daerah. Salah satu jalan tersebut adalah jalan utama menuju ke tempat pembelanjaan, tempat sekolah dan tempat kantor desa. Oleh karena itu dibutuhkannya pembangunan infrastruktur di jalan tersebut supaya memudahkan masyarakat untuk beraktifitas sehari-hari.

Mayoritas kegiatan perekonomian saat ini terfokus pada sektor

peternakan, pertanian, dan buruh tani. Walaupun demikian meskipun bekerja disektor pertanian sebagian besar mempunyai pekerjaan sampingan yaitu berkebun kelapa buah, berternak kambing dan sapi dan budidaya ikan. Dan ada juga sebagian kecil pekerjaan masyarakat sebagai pemborong kayu. Demi kelancaran pekerjaan masyarakat diperlukannya infrastruktur yang lebih efisien.

Penulis melihat bahwa di desa Wonoagung, peran pemimpin dan aparat desa masih minim dalam melaksanakan proyek pembangunan. Ini terlihat dari banyaknya pembangunan yang tidak merata, terutama di jalan..

Peran Kepala Desa Wonoagung jelas berdampak besar pada kemajuan desa, terutama pada pembangunan yang tidak memenuhi rencana. Kepala desa bertanggung jawab atas pengembangan wilayahnya dan memenuhi kebutuhan warganya, termasuk menyediakan fasilitas umum melalui pembangunan infrastruktur. Masyarakat desa wonoagung kabupaten malang sangat membutuhkan infrastruktur untuk memudahkan aktivitas sehari-hari mereka. Selain itu, warga Desa Wonoagung perlu disadarkan akan nilai pembangunan desa. Program pemerintah dituntut untuk menjunjung tinggi, mempertahankan, atau bahkan memajukan komunitasnya melalui pelaksanaan program pemerintah desa yang berpusat pada pembangunan desa tempat mereka tinggal.

Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat kinerja pemerintah. landasan pembangunan di tingkat desa khususnya di desa Wonoagung kecamatan Tirtoyudo

kabupaten Malang. Oleh karena itu, penulis berencana memberikan judul **“Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonoagung Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Penulis mencoba untuk mendefinisikan masalah penelitian berdasarkan uraian sebelumnya untuk meminimalkan jumlah pekerjaan yang terlibat dalam pengumpulan data yang diperlukan. Oleh karena itu, penulis memaparkan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Wonoagung?
2. Hambatan apa saja yang di hadapi kepala Desa Wonoagung dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Wonoagung?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Wonoagung.
2. Untuk menganalisis hambatan apa saja yang di hadapi kepala Desa Wonoagung dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang ingin dipecahkan oleh penelitian ini dan

tujuan-tujuan yang harus dicapai, penelitian ini diperkirakan akan menawarkan keuntungan-keuntungan yang diperkirakan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih baik bagi pemerintahan Desa Wonoagung. Dengan demikian harapan penulis dapat memberikan peluang dikembangkan lagi untuk peneliti berikutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk dapat menambah wawasan tentang pelaksanaan dan hambatan pembangunan infrastruktur menjadi kesimpulan yang menjawab masalah rumusan masalah penelitian.

2. Bagi universitas

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber berharga bagi akademisi masa depan yang mempelajari isu-isu terkait pembangunan infrastruktur di perpustakaan.

3. Bagi lokasi penelitian

Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu membentuk strategi pembangunan infrastruktur di Desa Wonoagung, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang.